

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Satu dari sekian banyaknya sasaran pembangunan nasional ialah memperbaiki kinerja ekonomi untuk membuka peluang kerja dan memastikan standar hidup yang layak bagi setiap warga Indonesia, sehingga tercapailah kesejahteraan bagi seluruh penduduk. Kemiskinan, yang berarti tidak mempunyai seorang individu dalam mencukupi kebutuhan konsumsi dasar guna mempertahankan kualitas hidup, adalah persoalan yang dihadapi hampir semua negara, khususnya negara berkembang sebagai contohnya Indonesia. Dikarenakan kebutuhan manusia beragam, kemiskinan mempunyai dimensi yang luas. Selain itu, kemiskinan juga mencakup berbagai aspek utama seperti organisasi sosial-politik, kurangnya aset, keterlibatan dalam wawasan, dan keterampilan, serta aspek-aspek tambahan sebagai contohnya melemahnya sumber daya keuangan, jaringan sosial, dan akses informasi. (Putri et al., 2019)

Keberhasilan pembangunan ekonomi diukur ketika pendapatan riil meningkat secara berkelanjutan tanpa disertai oleh peningkatan jumlah penduduk miskin maupun ketimpangan distribusi penghasilan (Yulhendri et al., 2006). Sementara itu, kemiskinan telah merupakan persoalan yang berlangsung lama di berbagai tempat dan harus segera dicari jalan keluarnya, baik di tingkat nasional ataupun regional (Margareni et al., 2016).

Kemiskinan, baik di tingkat nasional ataupun regional, telah dijadikan isu yang rumit dan terus-menerus, alhasil dibutuhkan strategi yang efektif dan berkelanjutan agar mengatasinya. Berbagai program yang telah diterapkan selama ini telah fokus secara intensif pada usaha untuk mengurangi kemiskinan. Namun, hingga kini, kemiskinan tetap menjadi tantangan yang belum sepenuhnya terpecahkan (Djayastra, 2016).

Menurut Badan Pusat Statistik (2023), Indonesia termasuk satu dari sekian banyak negara berkembang yang telah lama bergelut dengan masalah kemiskinan. Saat ini, sekitar 9,36 persen dari populasi Indonesia, yang

berjumlah kurang lebih 278 juta jiwa, masih tergolong sebagai masyarakat miskin. Dengan tolak ukur pendapatan, mayoritas penduduk Indonesia hanya memiliki penghasilan sebesar 1 USD per hari, atau sekitar lima belas ribu rupiah. Hal ini tidak hanya mencerminkan rendahnya tingkat kesejahteraan ekonomi, tetapi juga menggambarkan betapa rentannya sebagian besar masyarakat terhadap fluktuasi ekonomi. Mereka yang hidup dengan pendapatan sekecil ini berada di ambang kemiskinan ekstrem, di mana sedikit saja perubahan, seperti kenaikan harga kebutuhan pokok atau gangguan dalam akses ke pekerjaan, dapat mendorong mereka lebih jauh ke dalam kemiskinan. Kondisi ini semakin diperparah jika kita mempertimbangkan indikator dari Bank Dunia, yang menetapkan bahwa penghasilan kurang dari 2 USD per hari atau sekitar dua puluh lima ribu rupiah menempatkan individu dalam kategori kemiskinan ekstrem. Dalam situasi ini, mencukupi kebutuhan dasar sebagai contohnya makanan, pakaian, dan tempat tinggal menjadi tantangan yang luar biasa sulit. Bahkan, kebutuhan vital lainnya seperti pendidikan, layanan kesehatan, dan nutrisi yang memadai sering kali berada di luar jangkauan.

Kondisi kemiskinan yang demikian parah tidak hanya sekadar masalah ekonomi, tetapi juga memengaruhi kualitas hidup secara keseluruhan. Menurut analisis (Riedel & Sachs, 2005), kemiskinan tidak hanya diukur dari kurangnya pendapatan, tetapi juga dari kekurangan dalam berbagai aspek kehidupan yang lebih luas. Pertama, ada kekurangan dalam *human capital*, yang mencakup pendidikan yang memadai, layanan kesehatan yang terjangkau, dan akses terhadap nutrisi yang cukup. Tanpa pendidikan, individu tidak memiliki keterampilan yang diperlukan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, dan tanpa kesehatan yang baik, mereka tidak dapat bekerja dengan optimal. Kedua, kurangnya modal usaha menjadi penghalang besar bagi banyak orang yang ingin memulai atau mengembangkan usaha, yang seharusnya dapat menjadi sumber penghasilan yang stabil. Ketiga, infrastruktur yang minim seperti ketersediaan listrik, jalan yang layak, sanitasi, perlindungan lingkungan, air bersih, dan fasilitas publik lainnya, memperburuk kondisi kehidupan

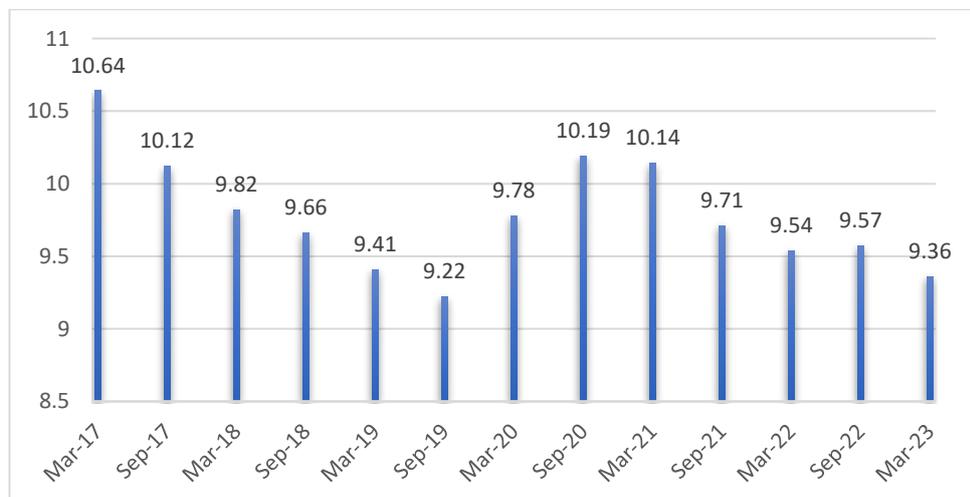
masyarakat miskin, membuat mereka semakin terisolasi dan sulit untuk mengakses peluang ekonomi dan layanan dasar.

Di samping hal tersebut, kemiskinan juga mampu diamati dari kurangnya sumber daya alam yang mampu dipergunakan dalam menunjang kehidupan sehari-hari. Di banyak wilayah, sumber daya alam seperti air bersih atau tanah subur menjadi semakin langka, dan hal tersebut memengaruhi kemampuan masyarakat dalam mencukupi kebutuhan dasar mereka. Selanjutnya ialah, *public institutional capital* atau modal kelembagaan publik, memainkan peran penting dalam mengatasi kemiskinan. Tanpa administrasi publik yang efisien, sistem peradilan yang bersih, dan layanan kepolisian yang dapat diandalkan, masyarakat miskin sering kali terpinggirkan dari perlindungan hukum dan akses terhadap layanan publik yang adil dan merata. Terakhir, *knowledge capital*, atau modal pengetahuan, adalah elemen penting yang sering kali terabaikan. Pengetahuan tidak hanya mencakup pendidikan formal, namun juga akses terhadap informasi dan keterampilan yang diperlukan dalam beradaptasi dengan perubahan sosial dan ekonomi. Kurangnya akses terhadap pengetahuan ini membuat masyarakat miskin semakin terpinggirkan dan terperangkap dalam siklus kemiskinan.

Dengan demikian, kemiskinan di Indonesia, seperti yang diuraikan melalui berbagai indikator ini, adalah masalah yang sangat kompleks dan berlapis. Tidak hanya mencakup kurangnya pendapatan, tetapi juga mencakup berbagai kekurangan yang saling berhubungan dan saling memperburuk. Atas dasar tersebut, upaya dalam memberantas kemiskinan haruslah holistik, meliputi peningkatan pendapatan sekaligus perbaikan dalam bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, sumber daya alam, kelembagaan publik, dan pengetahuan. Tanpa pendekatan yang menyeluruh ini, masyarakat miskin akan terus terperangkap dalam lingkaran kemiskinan yang sulit untuk dipatahkan, dan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan mereka akan menghadapi tantangan yang luar biasa.

Kemiskinan merupakan salah satu sasaran utama dalam kebijakan setiap negara, dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan pendapatan. Masalah kemiskinan bersifat multidimensi karena upaya untuk mengatasinya tidak hanya berkaitan dengan penyebab dan akibat kemiskinan, namun juga melibatkan nilai, preferensi, dan politik, seperti yang diungkapkan oleh (Margareni et al., 2016).

Perbedaan karakteristik wilayah di Indonesia, yang mencakup 38 provinsi yang tersebar di berbagai pulau, menyebabkan ketimpangan pembangunan yang signifikan. Tantangan ini mempengaruhi upaya untuk mencapai pembangunan yang inklusif dan mengurangi kemiskinan. Hal ini terlihat dari ketidakseimbangan dalam pertumbuhan ekonomi, pembangunan infrastruktur, sarana transportasi, pendidikan, dan fasilitas lainnya yang belum merata. Fluktuasi tingkat kemiskinan di Indonesia juga dapat diamati melalui grafik berikut.



Sumber : BPS, 2023

Gambar 1. 1 Persentase Penduduk Miskin Indonesia

Secara keseluruhan, tingkat kemiskinan di Indonesia menunjukkan tren penurunan selama periode Maret 2017 hingga Maret 2023, kecuali pada Maret 2020, September 2020, dan September 2022. Bertambahnya jumlah dan persentase penduduk miskin pada September 2022 diakibatkan oleh naiknya harga barang

kebutuhan pokok yang ditekankan oleh naiknya harga bahan bakar minyak. Sementara itu, peningkatan kemiskinan pada Maret dan September 2020 terjadi diakibatkan oleh pembatasan mobilitas penduduk sepanjang pandemi Covid-19. Pulau Jawa dan Sumatera terus mendominasi angka kemiskinan di Indonesia. Dengan merujuk pada data Badan Pusat Statistik (BPS) 2022, Pulau Sumatera mempunyai 576.342 ribu penduduk miskin, menjadikannya pulau termiskin kedua setelah Pulau Jawa.

Tabel 1. 1 Persentase Penduduk Miskin Pulau Sumatera Tahun 2022

Provinsi Pulau Sumatera	Persentase Penduduk Miskin (%)
	2022
Aceh	16,64
Sumatera Utara	8,42
Sumatera Barat	5,92
Riau	6,78
Jambi	7,62
Sumatera Selatan	11,90
Bengkulu	14,62
Lampung	11,57
Kep. Bangka Belitung	4,45
Kep. Riau	6,24
Rata- rata	9,22

Sumber : BPS, 2022

Menurut data pada tabel tersebut, pada tahun 2022, Provinsi Aceh mencatat persentase penduduk miskin paling tinggi di Pulau Sumatera dengan angka 14,64 persen, diikuti oleh Provinsi Bengkulu dengan 14,62 persen, dan Provinsi Sumatera Selatan dengan 11,90 persen. Di sisi lain, Provinsi melalui persentase penduduk miskin terendah yakni Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan 4,45 persen, Provinsi Sumatera Barat dengan 5,92 persen, dan Provinsi Kepulauan Riau dengan 6,24 persen. Rata-rata persentase penduduk miskin di Pulau Sumatera pada tahun 2022 sebanyak 9,22 persen, menunjukkan penurunan jika dibandingkan dengan dua

tahun sebelumnya, di mana pada tahun 2020 rata-rata persentase mencapai 9,49 persen dan pada tahun 2021 sebanyak 9,79 persen.

Tingkat kemiskinan yang bervariasi di setiap provinsi di Pulau Sumatera bisa menjadi masalah serius jika tidak ditangani secara efektif oleh pemerintah daerah. Menurut Sumitro (Rumahorbo, 2014), pembangunan ekonomi bertujuan untuk meningkatkan pendapatan perkapita, yang berkontribusi pada peningkatan produktivitas per kapita melalui peningkatan peralatan, modal, dan keterampilan. Dengan naiknya pendapatan perkapita, kesejahteraan masyarakat juga naik, sehingga kemiskinan dapat berkurang. Atas dasar ini, harus dijalankan sebuah kajian terkait pengaruh variabel- variabel yang mempengaruhi tingkat kemiskinan dan kontribusinya dalam mengurangi angka kemiskinan. Adapun variabel- variabel yang akan dianalisis dalam penelitian ini ialah pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia, infrastruktur, dan kepadatan penduduk. Hal ini didukung oleh berbagai pandangan ahli yang menyatakan adanya kaitan erat antara laju perekonomian dan tingkat kemiskinan.

Penelitian yang dijalankan oleh (Alisha & Yulhendri, 2021) memperlihatkan bahwasanya pertumbuhan ekonomi membawa dampak negatif pada kemiskinan, yang mana mengindikasikan peningkatan pertumbuhan ekonomi mampu meminimalisir tingkat kemiskinan. Temuan ini searah dengan pandangan (Gottschalk Peter & Sheldon, 1985), yang menyatakan bahwasanya keseluruhan tingkat pertumbuhan ekonomi dan dampak siklus pada makroekonomi berperan pada upaya pengentasan kemiskinan. (Osmani, 2004) juga berpendapat bahwasanya dalam merumuskan kebijakan untuk mengurangi kemiskinan, harus diutamakan adanya laju perekonomian dan elastisitas kemiskinan pada pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Berbagai penelitian di berbagai daerah telah membuktikan bahwasanya ditemukan hubungan erat antara pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan, di mana pertumbuhan ekonomi yang merata nantinya menambah kesejahteraan masyarakat serta meminimalisir kemiskinan (Lee & Sissons, 2016).

Berbagai penelitian sebelumnya telah banyak mengeksplorasi kaitan antara pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan. Pengentasan kemiskinan mampu

diraih baik dengan adanya pertumbuhan ekonomi maupun melalui redistribusi pendapatan (Son, 2006). Konsep ini didasarkan pada teori *trickle-down effect* yang menyatakan bahwasanya peningkatan PDB atau PDRB akan berdampak pada terciptanya lapangan kerja serta peluang ekonomi lainnya, yang mana nantinya mampu meminimalisir kemiskinan. Todaro (2006) berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi yang pesat dan pengurangan kemiskinan mampu terjadi dengan bersamaan dan bukan merupakan dua hal yang bertentangan. Adam Smith berargumen bahwasanya ekonomi nantinya meraih puncaknya jika ada pertumbuhan penduduk dan peningkatan output, sementara David Ricardo mengemukakan opini bahwasanya pertumbuhan populasi nantinya menyebabkan kelimpahan tenaga kerja, yang berpotensi menurunkan upah dan meningkatkan kemiskinan. (Sukirno, 2010).

Berdasarkan data dari BPS, pada tahun 2020, perekonomian di seluruh provinsi di Sumatera mengalami kontraksi dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan paling tajam terjadi di Kepulauan Riau, yang turun dari 4,83% pada 2019 menjadi -3,80% pada 2020, diikuti oleh Kepulauan Bangka Belitung dengan penurunan hingga -2,29%. Sementara itu, Bengkulu mencatat kontraksi paling kecil, hanya turun dari 4,94% menjadi -0,02%. Provinsi lain seperti Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, dan Lampung juga mengalami penurunan signifikan. Penurunan ini mencerminkan dampak pandemi COVID-19 terhadap perekonomian regional, yang menyebabkan perlambatan di berbagai sektor industri dan perdagangan.

Osmani (2004) mengungkapkan bahwasanya kebijakan pengurangan kemiskinan perlu memprioritaskan peningkatan laju perekonomian yang lebih tinggi serta memperhatikan andil pengangguran guna menjabarkan kaitan antara pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan, karena masyarakat miskin sering kali sangat bergantung pada pendapatan dari pekerjaan mereka. Interaksi antara pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan merupakan masalah yang rumit dan sering menjadi perdebatan. Umumnya, pertumbuhan ekonomi dianggap sebagai prasyarat penting untuk mengurangi kemiskinan.

Kemudian, penelitian yang dilakukan oleh Etty P. L (2022) berjudul "*Significant Role of the Human Development Index in Alleviating Poverty*" bertujuan untuk mengevaluasi peran penting Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dalam mengurangi tingkat kemiskinan. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa IPM memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap kemiskinan, yang berarti semakin tinggi IPM, semakin rendah tingkat kemiskinan.

Berdasarkan data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di provinsi-provinsi di Sumatera pada tahun 2019 dan 2020, secara umum terjadi peningkatan meskipun dengan besaran yang bervariasi. Kepulauan Riau memiliki IPM tertinggi, meningkat dari 75,48% pada 2019 menjadi 75,59% pada 2020. Sementara itu, beberapa provinsi seperti Sumatera Barat dan Sumatera Selatan mengalami sedikit penurunan, dengan Sumatera Barat turun dari 72,39% menjadi 72,38% dan Sumatera Selatan dari 70,02% menjadi 70,01%. Provinsi dengan peningkatan terbesar adalah Bengkulu, yang naik dari 71,21% menjadi 71,40%. Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat tantangan ekonomi, pembangunan manusia di Sumatera tetap mengalami perkembangan positif. (BPS, 2020)

Selanjutnya, peneliti memutuskan untuk menganalisis variabel kepadatan penduduk sebagai faktor yang dapat memengaruhi tingkat kemiskinan. Keputusan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahma W.P dkk (2019) dalam studi mereka yang berjudul "*Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia, dan Kepadatan Penduduk terhadap Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi.*"

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa kepadatan penduduk memiliki dampak yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jambi. Artinya, semakin tinggi tingkat kepadatan penduduk di suatu wilayah, semakin besar pula potensi pengaruhnya terhadap peningkatan angka kemiskinan. Hal ini dapat terjadi karena keterbatasan sumber daya ekonomi, lapangan pekerjaan, serta akses terhadap pendidikan dan kesehatan yang semakin terbatas ketika jumlah penduduk yang mendiami suatu daerah semakin padat.

Selain itu, dengan bertambahnya kepadatan penduduk, persaingan dalam mendapatkan pekerjaan dan sumber daya ekonomi semakin tinggi, yang dapat memperbesar kesenjangan sosial dan ekonomi di wilayah tersebut. Oleh karena itu, pemahaman mengenai peran kepadatan penduduk dalam menentukan tingkat kemiskinan menjadi penting dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Berdasarkan data kepadatan penduduk provinsi di Sumatera pada tahun 2019 dan 2020, terjadi variasi perubahan kepadatan di berbagai daerah. Beberapa provinsi mengalami peningkatan kepadatan penduduk, seperti Lampung yang naik signifikan dari 244 jiwa/km² pada 2019 menjadi 260 jiwa/km² pada 2020, serta Sumatera Utara yang meningkat dari 200 jiwa/km² menjadi 203 jiwa/km². Sebaliknya, beberapa provinsi mengalami penurunan kepadatan, seperti Kepulauan Riau yang turun dari 267 jiwa/km² menjadi 252 jiwa/km², serta Riau dari 80 jiwa/km² menjadi 73 jiwa/km². Sementara itu, Sumatera Selatan tetap stabil dengan angka 92 jiwa/km² dalam dua tahun berturut-turut. Perubahan kepadatan penduduk ini mencerminkan dinamika migrasi dan pertumbuhan populasi yang dapat memengaruhi aspek sosial dan ekonomi di setiap wilayah. (BPS, 2020)

Menurut teori Keynesian, untuk mencapai struktur ekonomi yang efektif, akumulasi modal merupakan elemen utama yang mempengaruhinya (Bayu Windayana & Darsana, 2020). Akumulasi modal ini dapat mencakup investasi dalam infrastruktur; jika infrastruktur tidak memadai, implementasi ekonomi di suatu negara bisa menjadi kurang optimal, mengakibatkan beban logistik yang berat, masalah sosial, dan penurunan daya saing. Infrastruktur yang baik dapat mempermudah kegiatan ekonomi dan memperlancar distribusi barang, sehingga mampu ditarik kesimpulan bahwasanya infrastruktur ialah alat publik utama yang berfungsi guna mengelola perekonomian nasional. Atas dasar tersebut, pembangunan infrastruktur yang memadai nantinya menghasilkan sistem transportasi yang efisien dalam masyarakat.

Peran pemerintah sangat penting dalam menurunkan angka kemiskinan, salah satunya dengan mengurangi tingkat pengangguran melalui penciptaan lapangan

pekerjaan sebanyak kemungkinan dan pengelolaan anggaran pemerintah yang lebih efisien, dengan prioritas alokasi yang lebih besar untuk pembangunan infrastruktur. Peningkatan infrastruktur dapat mewujudkan iklim usaha yang lebih kondusif, meningkatkan investasi, dan akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi serta kualitas sumber daya manusia. Hal tersebut berpotensi menambah kesejahteraan masyarakat, terutama di Sumatera.

Mengingat permasalahan dan realita yang telah dijelaskan pada latar belakang penelitian, penulis memutuskan menjalankan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia, Infrastruktur dan Kepadatan Penduduk Terhadap Tingkat Kemiskinan Provinsi- Provinsi di Sumatera”**.

1.2 Rumusan Masalah

Pada penelitian ini dijalankan perumusan seperti berikut:

1. Bagaimana kondisi kemiskinan provinsi- provinsi di Sumatera tahun 2019-2023?
2. Bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia, kepadatan penduduk, dan infrastruktur terhadap tingkat kemiskinan provinsi- provinsi di Sumatera tahun 2019-2023?

1.3 Tujuan Penelitian

Pada penelitian ini bermaksud guna:

1. Untuk menganalisis kondisi tingkat kemiskinan provinsi- provinsi di Sumatera tahun 2019- 2023
2. Untuk menganalisis pengaruh parsial pertumbuhan ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia, kepadatan penduduk, dan infrastruktur terhadap tingkat kemiskinan provinsi- provinsi di Sumatera 2019- 2023

1.4 Manfaat Penelitian

Searah dengan tujuan penelitian yang telah dideskripsikan, harapannya penelitian ini mampu mendatangkan berbagai kegunaan, diantaranya:

1. Dari segi akademis, penelitian ini harapannya mampu memperluas wawasan sehubungan dengan dampak pertumbuhan ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), kepadatan penduduk, dan infrastruktur pada tingkat kemiskinan provinsi- provinsi di Sumatera. Di samping hal tersebut, hasil penelitian ini mampu menjadi referensi bagi studi-studi selanjutnya.
2. Dari perspektif praktis, diharapkan penelitian ini mampu menyediakan informasi dan pertimbangan bagi para pengambil keputusan, terutama pemerintah provinsi- provinsi di Sumatera, dalam merancang kebijakan atau program yang bermaksud guna meminimalisir kemiskinan dan meratakan kesejahteraan masyarakat.